

RAPBN TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK MELANJUTKAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

19

Hilma Meilani

Abstrak

RAPBN Tahun Anggaran 2021 mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021 yaitu 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi'. Pada tahun 2020 anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. RAPBN Tahun Anggaran 2021 akan mengalokasikan Rp356,5 triliun sebagai kelanjutan Program PEN 2020. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi PEN 2020 per 19 Agustus 2020 baru mencapai Rp 174,79 triliun (25,1% dari pagu). Tulisan ini mengkaji kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 sebagai lanjutan dari Program PEN 2020, dan percepatan realisasi penyerapan anggaran Program PEN 2020. Program PEN 2021 dan percepatan penyerapan anggaran PEN 2020 diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional positif. DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran perlu memperhatikan agar kebijakan fiskal tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai rencana. DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan guna mempercepat percepatan penyerapan anggaran PEN 2020.

Pendahuluan

Dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 14 Agustus 2020 Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah akan mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi'. Ada 4 langkah strategis: (1) mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19; (2) mendorong reformasi struktural

untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi; (3) mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital; (4) pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Untuk menahan dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, pemerintah telah dan akan melakukan langkah-langkah kebijakan untuk menjaga dan memulihkan kondisi kesehatan, sosial ekonomi masyarakat, dan dunia usaha terutama UMKM. Pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kontraksi lebih dalam dan



memulihkan sisi permintaan, seperti konsumsi, investasi dan ekspor, dan juga sisi penawaran atau sisi produksi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV-2020 yang positif, sehingga kinerja ekonomi tahun 2020 dan 2021 juga tumbuh positif dan jauh dari resesi. Tulisan ini menganalisis kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 sebagai lanjutan Program PEN 2020, dan percepatan realisasi penyerapan anggaran PEN 2020.

Postur RAPBN Tahun Anggaran 2021

Target pendapatan negara pada RAPBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.776,4 triliun. Angka tersebut terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri Rp1.446,9 triliun (penerimaan perpajakan sebesar Rp1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp293,5 triliun, dan hibah Rp902,8 miliar.

Belanja negara pada RAPBN Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan mencapai Rp2.747,5 triliun (tumbuh 0,3% dari APBN Perpres No. 72 Tahun 2020) atau 15,6% terhadap PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.951,3 triliun (menurun 1,2% dari APBN Perpres No. 72 Tahun 2020), dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp796,3 triliun (tumbuh 4,2% dari APBN Perpres No. 72 Tahun 2020). Belanja negara mencakup stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 sebesar Rp356,5 triliun (turun dari Rp695,2 triliun pada tahun 2020), dan fokus pada menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia (kemenkeu.go.id, 15 Agustus 2020).

Melanjutkan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021

Berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, anggaran PEN dialokasikan sebesar Rp695,2 triliun. Pemerintah akan mengalokasikan Rp356,5 triliun dari RAPBN Tahun Anggaran 2021 sebagai kelanjutan dari program PEN tahun 2020, yang terdiri atas 6 sektor yaitu: (1) penanganan kesehatan dengan anggaran Rp25,4 triliun (turun dari Rp87,55 triliun di tahun 2020), untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPJ; (2) dukungan perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah dengan anggaran Rp110,2 triliun (turun dari Rp203,9 triliun di tahun 2020), dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu Pra Kerja, serta bantuan sosial (bansos) tunai; (3) dukungan pada sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) dengan anggaran Rp136,7 triliun (naik dari Rp106,11 triliun di tahun 2020), yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi; (4) dukungan pada UMKM dengan anggaran Rp48,8 triliun (turun dari Rp123,46 triliun di tahun 2020), melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan; (5) pembiayaan korporasi dengan anggaran Rp14,9 triliun (turun dari Rp53,57 triliun di tahun 2020), yang diperuntukkan

bagi berbagai lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan; (6) insentif bagi dunia usaha sebesar Rp20,4 triliun (turun dari Rp120,61 triliun di tahun 2020), melalui pajak ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN (Media Indonesia, 15 Agustus 2020). Anggaran kesehatan sebesar Rp25,4 triliun perlu untuk mendapat perhatian, mengingat anggaran kesehatan pada PEN tahun 2020 sebesar Rp87,55 triliun hingga saat ini belum terserap dengan baik.

Realisasi Anggaran Program PEN 2020

Hingga 6 Agustus 2020 penyerapan anggaran PEN 2020 baru mencapai 21,8% dari alokasi Rp695,2 triliun. Serapan paling tinggi pada sektor perlindungan sosial (42,4%), diikuti dukungan UMKM (26,3%), insentif usaha (13,7%), K/L dan pemda (8,1%), kesehatan (8,1%), dan pembiayaan korporasi (0%). Menurut pemerintah, beberapa poin yang menghambat serapan antara lain masalah regulasi, ego sektoral, dan kendala dari sisi administrasi (Bisnis Indonesia, 18 Agustus 2020).

Tabel 1. Realisasi dan Pagu Anggaran PEN 2020 Per 19 Agustus 2020 (Triliun Rp)

Sektor	Pagu 2020	Realisasi 19-08-2020	Persentase	Perincian Program
Kesehatan	87,55	7,36	8,41%	Insentif kesehatan pusat dan daerah, santunan kematian tenaga medis, Gugus Tugas Covid-19, insentif bea masuk & PPN Kesehatan.
Perlindungan Sosial	203,91	93,18	45,70%	PKH, kartu sembako Jabodetabek, bantuan tunai non-Jabodetabek, kartu Pra-Kerja, diskon listrik, BLT Dana Desa.
Sektoral Kementerian/ Lembaga dan Pemda	106,05	12,40	11,69%	Padat karya, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, bantuan produktif bagi 1 juta usaha mikro.
Dukungan UMKM	123,47	44,63	36,15%	Penempatan dana, pembiayaan investasi LPDB, PPh final UMKM DTP, subsidi bunga UMKM.
Insentif Usaha	120,61	17,23	14,29%	PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan.
Pembiayaan Korporasi	53,57	0,00	0,00%	Tengah mematangkan program PMN untuk BUMN, penjaminan kredit korporasi, pemberian pinjaman kepada beberapa BUMN.
Total	695,16	174,79		

Sumber: Kementerian Keuangan dan Kontan, diolah.

Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) tanggal 24 Agustus 2020 Menkeu menyampaikan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya kuartal 3 (Q3) 2020 diperlukan percepatan realisasi belanja pemerintah khususnya penyerapan PEN melalui perpanjangan program, percepatan usulan baru, redesain dan penyesuaian program dan penyederhanaan prosedur.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi PEN hingga 19 Agustus 2020 mencapai Rp174,79 triliun atau 25,1% dari pagu (kemenkeu.go.id, diakses 24 Agustus 2020). Rincian realisasi dan pagu anggaran PEN 2020 per 19 Agustus 2020 dan perincian program PEN 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

Serapan paling tinggi pada sektor perlindungan sosial (45,70%), diikuti dukungan UMKM (36,15%), insentif usaha (14,29%), K/L dan pemda (11,69%), kesehatan (8,41%), dan pembiayaan korporasi (0%). Penyerapan anggaran program PEN masih rendah, padahal penyerapan anggaran PEN sudah sangat mendesak karena Indonesia sedang berupaya lolos dari jurang resesi pada kuartal III/2020 sekaligus mencetak pertumbuhan ekonomi positif ada akhir tahun (Bisnis Indonesia, 25 Agustus 2020).

Menurut Menkeu Sri Mulyani, salah satu kendala penyerapan anggaran PEN adalah karena ada program baru sementara data di program baru belum tersedia, dan mekanisme penyaluran belum

siap, selain pemerintah juga harus menambah dan merevisi regulasi. Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto, pemerintah berupaya mempercepat penyerapan anggaran PEN terutama program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai untuk UMKM dan subsidi gaji di bawah Rp5 juta (Kontan, 25 Agustus 2020).

Agar penyerapan anggaran PEN 2020 dapat optimal maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah terobosan: (1) menyederhanakan regulasi dan menghilangkan ego sektoral; (2) menggencarkan sosialisasi terkait stimulus yang telah digulirkan; (3) melakukan pemberian insentif yang tepat sasaran; (4) mengoptimalkan pengawasan penyaluran dan pelaporan atas implementasi kebijakan tersebut.

Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran

Program dan kebijakan strategis dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi antara lain melalui percepatan realisasi belanja pemerintah dan program strategis jangka pendek untuk mendorong percepatan realisasi anggaran. Percepatan belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut kelancaran serapan anggaran proram PEN akan sangat menentukan peluang Indonesia untuk dapat lepas dari resesi ekonomi pada kuartal III/2020, sehingga pemerintah harus melakukan penyempurnaan pelaksanaan program PEN dengan menyederhanakan proses pembuatan regulasi-regulasi terkait.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), rendahnya serapan PEN untuk dunia usaha membuktikan bahwa ada insentif yang tidak tepat sasaran atau tidak dibutuhkan pelaku industri, misalnya untuk pengurangan angsuran PPh 25 banyak perusahaan mencatat rugi dan tidak mampu membayar sehingga pengurangan angsuran tidak banyak memberikan dampak, selain itu insentif usaha PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) dinilai tidak tepat guna karena banyak pekerja mendapat gaji di bawah normal akibat terdampak pandemi Covid-19. Ekonom Indef Enny Sri Hartati berpendapat dukungan bagi pelaku usaha harusnya tidak diberikan dalam bentuk bantuan tunai seperti bantuan sosial tetapi diberikan dari sisi kemudahan pembiayaan yang bisa mendorong keberlanjutan usaha tersebut (Bisnis Indonesia, 25 Agustus 2020).

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pemerintah harus memastikan RAPBN Tahun Anggaran 2021 selain mengalokasikan program dan anggaran penanganan Covid-19 dan dampaknya, juga harus memastikan keberlanjutan pembangunan nasional dan pelayanan umum negara. Selain itu, pemerintah perlu menyusun strategi pembiayaan utang yang memperhatikan risiko dan kapasitas fiskal dari APBN (dpr.go.id, 15 Agustus 2020).

Berbagai strategi percepatan serapan anggaran program PEN 2020 yang telah dilakukan pemerintah hingga mendekati kuartal III tahun 2020 dinilai belum mencapai hasil yang optimal. Strategi percepatan penyerapan anggaran program PEN yang perlu dilakukan pemerintah adalah: (1) mengakselerasi eksekusi program PEN; (2) memperkuat konsumsi pemerintah; dan (3)

memperkuat konsumsi masyarakat dengan mempercepat belanja bantuan sosial.

Penutup

Penyerapan anggaran PEN 2020 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi positif pada triwulan III dan IV tahun 2020. Sementara penyusunan kebijakan fiskal yang ekspansif pada RAPBN Tahun Anggaran 2021 adalah melanjutkan pemulihan ekonomi nasional, di tengah ketidakpastian perekonomian dunia saat ini. Dengan stimulus fiskal tahun 2020 dan postur RAPBN Tahun 2021, maka pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi dapat kembali positif serta optimis sesuai target yang disepakati DPR RI dan pemerintah.

DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran perlu memperhatikan agar kebijakan fiskal tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai rencana dan kesepakatan bersama. DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan guna mempercepat percepatan penyerapan anggaran PEN 2020.

Referensi

“APBN Harus Ciptakan Kemakmuran bagi Rakyat”, 14 Agustus 2020, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29711/t/APBN+Harus+Ciptakan+Kemakmuran+Bagi+Rakyat>, diakses 25 Agustus 2020.

“Dorong Pertumbuhan Kuartal 3 Penyerapan PEN Perlu Percepatan Realisasi”, 24 Agustus 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dorong-pertumbuhan-kuartal-3-penyerapan-pen-perlu-percepatan-realisasi/>, diakses 24 Agustus 2020.

- "Fokus Fiskal untuk Percepat Pemulihan", *Kompas*, 15 Agustus 2020, hal. 1.
- "Indonesia Optimistis Menyongsong 2021", *Media Indonesia*, 15 Agustus 2020, hal. A1.
- "Insentif Macet, Industri Seret", *Bisnis Indonesia*, 25 Agustus 2020, hal. 4.
- "Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi", *Bisnis Indonesia*, 25 Agustus 2020, hal. 1.
- "Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021", www.kemenkeu.go.id, diakses 15 Agustus 2020.
- "Pemerintah Susun Strategi Percepatan Realisasi Belanja Program Strategis", 21 Agustus 2020, <https://setkab.go.id/pemerintah-susun-strategi-percepatan-realisasi-belanja-program-strategis/>, diakses 24 Agustus 2020.
- "PEN Jilid II Realisasi Harus Terus Disoroti", *Bisnis Indonesia*, 18 Agustus 2020, hal. 16.
- "Program PEN Belum Ampuh Ungkit Ekonomi", *Kontan*, 25 Agustus 2020, hal. 1.



Hilma Meilani
hilma.meilani@dpr.go.id

Hilma Meilani, S.T., MBA., menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002, pendidikan S2 jurusan Finance pada Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Kebijakan Ekonomi pada bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah" (2013), "Desentralisasi Fiskal dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (2014)", dan "Peran Kebijakan Persaingan Usaha untuk Meningkatkan Efisiensi menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) (2015)".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.